

**Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap  
Kinerja Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau).**

**Oleh :**

**Yulia Petra Harvianda**

**R. Adri Satriawan Surya, SE, MA, Ak**

**Nur Azlina, SE, M.Si, Ak**

*Email : [yuliapetraharvianda27@yahoo.com](mailto:yuliapetraharvianda27@yahoo.com)*

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

**ABSTRAKS**

*One important element of good government is the absence of public accountability, in addition to transparency, rule of law, and regulations. Therefore, supervision is an essential element in the process of government management, has a strategic role for the realization of public accountability in the governance and development. One is the performance of the government on regional work units.*

*This study aims to determine the effect of Functional Control and Public Accountability to the Local Government Performance In SKDP Riau Province. Respondents in this study are numbered 38 people. The type of data used is the data in the form of the data subject with the method of data collection using questionnaires. The method of data analysis used in this study is a multiple linear regression (multiple regression) with the help of Statistical Product and Service Solution (SPSS) software version 19.0.*

*The results of this study showed both partial and simultaneous monitoring of functional variables significantly influence the performance and accountability of local government, because in the world of government, every part of government must be right people, which has competence in accordance with the predetermined qualification. While the coefficient of determination shows all variables of independently functional oversight and public accountability used in this study provide a contribution of 15.2% to the dependent variable of local government performance. While the remaining 84.8% describe other independent variables were not included in this study.*

*Keywords: functional oversight, public accountability and performance of local government.*

## 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan.

Revrisond (2004:128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan beribawa.

J.B. Sumarlin (2004)

menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit (organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis.

Revrisond Baswir (2004:138) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu priode tertentu” Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan dengan baik.

Oleh karena itu Kinerja Pemerintah Daerah perlu dikembangkan agar dalam kinerjanya dapat mencapai suatu tujuan yang tepat dengan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk dapat suatu kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja pemerintah daerah yang akurat, dapat dipercaya dan tepat sasaran, serta terciptanya kinerja pemerintah daerah yang sentralistik kepada desentralistik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat) oleh Andika Ardiansyah (2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, variabel Independen yaitu Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan satu variabel Akuntabilitas Publik yang diadopsi dari penelitian Deki Putra (2013) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)”.

Variabel Dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah adalah kinerja yang merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk terhadap tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditujukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Riau. Maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seauhmana Pengawasan Fungsional memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau?
2. Seauhmana Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau?
3. Seauhmana Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pengawasan Fungsional memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

2. Bagi Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini SKPD di Propinsi Riau dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan memperhatikan pengaruh pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik.
3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1.1. Pengertian Kinerja**

Menurut Moehariono (2009:60) pengertian kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Mangkunegara (2000: 67) mendefinisikan kinerja sebagai:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”

Pengertian kinerja menurut Bastian (2002:329) menyatakan bahwa :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

skema strategis suatu organisasi”.

Sementara itu Hasibuan (2002: 94) mengatakan bahwa :

“Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan dan tepat waktu”.

##### **2.1.1.2. Perencana Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan “proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan”.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang susunan rencana kerja dilakukann seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

##### **2.1.1.3. Fungsi Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah

kegiatan selesai dan berfungsi.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan / program / kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
- c. Membangun bagi dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja.

#### **2.1.1.4. Indikator Kinerja**

Menurut Indra Bastian (2001:337) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*) terdiri dari yaitu :
  - Penggunaan Dana
  - Sumber daya Manusia
  - Material
2. Keluaran (*Output*) terdiri dari yaitu :
  - Pencapaian Kebijakan Tujuan
3. Hasil (*Outcomes*) terdiri dari yaitu :
  - Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - Laporan Akuntabilitas Kinerja
4. Manfaat (*Benefits*) terdiri dari yaitu :
  - Tepat Lokasi

- Tepat Waktu

5. Dampak (*Impact*) terdiri dari yaitu :

- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
- Meningkatkan Prestasi Kerja
- Efisiensi
- Efektivitas

#### **2.1.1.5. Program-program pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah, meliputi**

- 1) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.
- 3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan

kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

- 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

#### **2.1.1.6. Efektifitas Kinerja**

Masalah efektivitas merupakan hal yang penting dalam melaksanakan aktivitas. Agar aktivitas dapat diukur, maka tujuan dari kegiatan tersebut ditetapkan dengan jelas, karena tanpa adanya tujuan, kita tidak dapat menilai tercapai atau tidaknya efektivitas tersebut.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu Instansi berhasil mencapai tujuan, maka Instansi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh

tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hans Kartikahardi (2004:182) yang dikutip oleh Sukirno Agoes, yang dimaksud dengan efektivitas adalah :

“Efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara masukan dan keluaran dalam berbagai kegiatan sampai dengan tujuan yang ditetapkan baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan”.

#### **2.1.2. Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009) adalah :

“Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Pengawasan Fungsional menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) adalah :

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.”

Pengertian Pengawasan Fungsional menurut Sadu Wasistiono (2010) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.”

### 2.1.3. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meng-ungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:226). Ruang Lingkup Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pe-merintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

## 2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1 Hubungan antara Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) PP No. 79 tahun 2005 disebutkan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal ini maka yang menghubungkan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah dalam bukunya “Akuntansi Pemerintahan Indonesia” Revrisond Baswir (2004:138) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah.

Andhika Ardiansyah (2010) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat) membuktikan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

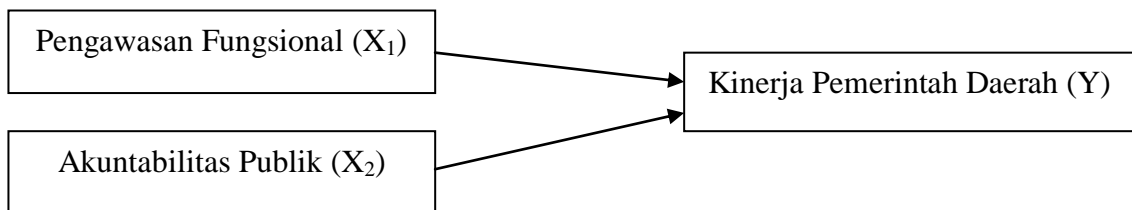
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis membuat hipotesis bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 2.2.2. Hubungan antara Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Deddi (2010), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja.

Penelitian yang dilakukan Variabel Independen



Gambar: Model Penelitian

### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H2 : Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

oleh Deki Putra (2013) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Fakhri (2011) menguji Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

### 2.3 Model Penelitian

Pengaruh antara pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:

Variabel Dependen

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel (*sample*) yaitu anggota populasi yang disebut dengan elemen populasi (Indriantoro, 2002). Pengambilan sampel (*sampling*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara 'benar' dari suatu populasi, sehingga



dapat digunakan sebagai 'wakil' yang sah (dapat mewakili) bagi populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. SKPD di provinsi Riau berjumlah 38 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah Propinsi Riau, 1 Inspektorat Propinsi Riau, 1 Sekretaris DPRD Provinsi Riau, 1 Sekretaris Korpri Provinsi Riau, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 2 Rumah Sakit (RSUD dan RSJ), 14 Badan, dan 17 Dinas. Untuk penelitian ini hanya akan dilakukan di Dinas dan Badan lingkungan pemerintah propinsi Riau. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan propinsi Riau. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja Dinas dan Badan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1. Jenis Data**

Data pada penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi data subjek, data fisik dan data dokumenter. Pada penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lebih spesifiknya ke Dinas dan Badan di lingkungan pemerintah propinsi Riau.

#### **3.2.2. Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke SKPD (Dinas dan Badan) di lingkungan pemerintah propinsi Riau.

### **3.3 Metode Analisis Data**

#### **3.3.1. Uji Kualitas Data**

Ketetapan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada suatu kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Uji kualitas data ada dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas (Wijaya, 2010).

##### **3.3.1.1. Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (Wijaya, 2010). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus *Product Moment* Pearson dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 19. Jika nilainya negatif atau kecil dari r tabel, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilainya besar dari r tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r hitung yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

##### **3.3.1.2. Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrument. Reliabilitas instrument yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu skala merupakan indikator dari variabel atau *construct*. Cara mengukur reliabilitas yang paling umum adalah dengan menggunakan koefisien alpha. Koefisien alpha bisa diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $\geq$  0,6 (Sekaran, 2003). Uji reliabilitas

juga dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 19.

### 3.4 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data.

### 3.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 19.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Kriteria

pengujian untuk uji t adalah:

- a.  $H_0$  diterima jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ .
- b.  $H_0$  ditolak jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ .

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- $b_{1,2,3,4}$  = Koefisien Regresi Parsial
- e = Variabel Pengangguan (error)
- $X_1$  = Gaya Kepemimpinan
- $X_2$  = Budaya Organisasi
- $X_3$  = Motivasi Kerja
- $X_4$  = Lingkungan Kerja
- Y = Kinerja Akuntan Pemerintahan

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pengembalian Kuesioner

Kuesioner penelitian ini mulai disebar tanggal 10 Maret 2014 dan terkumpul ke tangan peneliti tanggal 26 Maret 2014. Tingkat pengembalian kuesioner dapat digambarkan seperti tabel berikut:

**Tabel 4.2 : Tingkat Pengembalian Kuesioner**

	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	155	100 %
Kuesioner yang kembali	103	66,45 %
Kuesioner yang tidak kembali	52	33,55%
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	103	66,45%

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 155 buah atau sebesar 100%. Kuesioner yang kembali sebanyak 103 buah atau sebesar 66,45%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 52 atau sebesar 33,55%. Dari keseluruhan kuesioner yang kembali, setelah diperiksa dinyatakan seluruh

kuesioner yang kembali dapat dianalisis lebih lanjut, dengan tingkat pengembalian atau partisipasi responden sebesar 66,45%.

### 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

**Tabel 4.4 : Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PFTotal (X <sub>1</sub> )	103	50.00	62.00	55.9612	3.24769
APTtotal (X <sub>2</sub> )	103	48.00	59.00	52.6796	3.42486
KPDTotal (Y)	103	27.00	35.00	30.6505	1.80255
Valid N (listwise)	103				

Dalam penelitian ini diketahui jumlah responden (n) variable Pengawasan Fungsional (X<sub>1</sub>) sebanyak 103, didapat nilai minimum adalah 50, nilai maximum adalah 62 dari 13 pertanyaan dan nilai rata-rata (mean) adalah 55,96. Pada Variabel Akuntabilitas Publik (X<sub>2</sub>) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 103, didapat nilai minimum adalah 48, nilai maximum adalah 59 dari 13 pertanyaan dan nilai rata-rata (mean) adalah 30,65. Untuk Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 103, didapat nilai minimum adalah 27, nilai maximum adalah 35 dari 7 pertanyaan dan nilai rata-rata (mean) adalah 30,65. Dari deskripsi distribusi data menunjukkan, tingginya minat responden terhadap variabel Pengawasan Fungsional (X<sub>1</sub>), Akuntabilitas Publik (X<sub>2</sub>) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hal ini ditunjukkan dengan indeks mean atau rata-rata yang mendekati angka maksimum.

### 4.3. Hasil Uji Kualitas Data

#### 4.3.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka instrumen tersebut dikatakan valid. r tabel dapat dilihat di tabel r (*correlation pearson*) uji 1 sisi dan 2 sisi pada taraf signifikansi

0,05. r tabel untuk sampel sebanyak 103 adalah 0,194.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Pengawasan Fungsional (X<sub>1</sub>) bahwa ada dua item pertanyaan yang tidak valid yaitu item pertanyaan nomor 1 dan 12. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk item pertanyaan nomor 1,  $r_{hitung} 0,079 < r_{tabel} 0,194$  dan item pertanyaan nomor 12,  $r_{hitung} 0,069 < r_{tabel} 0,194$ . Oleh sebab itu, kedua item pertanyaan tersebut tidak dimasukkan untuk mengolah data selanjutnya.

Berdasarkan hasil uji validitas

untuk variabel Akuntabilitas Publik (X<sub>2</sub>) bahwa ada dua item pertanyaan yang tidak valid yaitu item pertanyaan nomor 12 dan 13. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk item pertanyaan nomor 12,  $r_{hitung} -0,021 < r_{tabel} 0,194$  dan item pertanyaan nomor 13,  $r_{hitung} -0,032 < r_{tabel} 0,194$ . Oleh sebab itu, kedua item pertanyaan tersebut tidak dimasukkan untuk mengolah data selanjutnya.

#### 4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di

atas 0,6 (Ghozali, 2009:45).

### 4.3.3. Hasil Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 4.12 : Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.385 <sup>a</sup>	.152	.145	1.80372	1.477

a. Predictors: (Constant), APTotal, PFTotal

b. Dependent Variable: KPDTotal

Apabila nilai R mendekati + 1 maka secara bersama-sama variabel-variabel bebas tersebut mempunyai hubungan positif yang cukup kuat. Selain itu dapat dijelaskan bahwa nilai R sebesar 0,385 mengandung arti variasi variabel Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap variabel dependen. R Square sebesar 0,152 (15,2%) ini menerangkan bahwa kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau dapat diterangkan oleh faktor Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik sebesar 15,2%, sedangkan sisanya sebesar 84,8% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### 4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

#### 1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diuji adalah:

H<sub>0</sub> = Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>1</sub> = Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan koefisien  $\beta$  pada persamaan regresi (X<sub>1</sub>) sebesar 0,079

dengan signifikan p sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ) atau pada nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,814 > 1,984$ ). Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengawasan Fungsional (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.

#### 2. Hasil Uji Hipotesis Ketua

Hipotesis kedua yang diuji adalah:

H<sub>0</sub> = Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>2</sub> = Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa koefisien  $\beta$  persamaan regresi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,223 signifikan dengan nilai p sebesar 0,007 ( $p < 0,05$ ) atau pada nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,628 > 1,984$ ). Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>2</sub> diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Publik (X<sub>2</sub>) memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik

terhadap kinerja pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) propinsi Riau. Dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di satuan kerja pemerintah daerah provinsi Riau. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dapat mengarahkan aparat pemerintah pada pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di satuan kerja perangkat daerah provinsi Riau. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui rencana anggaran dari program yang dijalankan pemerintah tetapi juga mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

3. Nilai koefisien determinasi adalah  $R^2$  sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan variabel independen pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik yang digunakan mampu menjelaskan 15,2% variabel kinerja pemerintah daerah. Sedangkan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini tidak memasukkan metode wawancara kepada responden, hal ini disebabkan karena kesibukan responden itu sendiri yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara. Sebagian besar responden meminta supaya kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan jawaban responden pada saat pengisian kuesioner. Hal ini mengakibatkan jawaban responden belum tentu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian satuan kerja perangkat daerah Provinsi Riau sehingga belum dapat memberikan gambaran umum yang lebih jelas mengenai pengaruh pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

3. Pada penelitian ini hanya melihat variabel pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tersebut.

### 5.3 Saran dan Implikasi

Dengan keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh di masa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.
2. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
3. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam rangka pengelola keuangan daerah yang baik, sebaiknya menerima pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan pelatihan di bidang keuangan dan pengetahuan pendukung lainnya.

Meskipun dalam konteks yang kecil, namun hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Berhasilnya hipotesis yang

disusun diharapkan bisa menjadi rujukan dan masukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) propinsi Riau untuk mengevaluasi pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik yang terlaksana untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2004), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- A.Anwar Prabu Mangkunegara (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Askam Tuastikal. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Finance and Banking Journal vol. 10. No. 1.
- Ardiansyah, Andhika. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung.
- Badan Kepegawaian Negara. 2003. Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Bambang Yudoyono. (2003). Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah

- Daerah Dan Anggota DPRD.  
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bintang Susmanto (2009).  
Pengawasan fungsional.  
Remaja Rosdakarya,  
Bandung.
- Deddi Nordiawan (2008). Akuntansi  
Sektor Publik. Salemba  
Empat, Jakarta.
- Dekki Putra. 2013. Pengaruh  
Akuntabilitas Publik Dan  
Kejelasan Sasaran Anggaran  
Terhadap Kinerja Manajerial  
Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (Studi Empiris pada  
Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Kota Padang). Skripsi,  
Universitas Negeri Padang.
- Dina Mardiana. 2011. *Pengaruh  
Kinerja Pegawai dan  
Pengawasan Fungsional  
terhadap Efektifitas  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah (Survey pada  
Inspektorat Kota Bandung)*.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor  
Publik. Penerbit Andi.  
Yogyakarta.
- Hindri Asmoko (2006). “Pengaruh  
Penganggaran Berbasis  
Kinerja terhadap Efektivitas  
Pengendalian”. Melalui  
(<http://www.bppk.depkeu.go.id>).[1 Desember 2008].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2000.  
Standar Profesional Akuntan  
Publik Per Januari 2001.  
Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo. 2002.  
*Metode Penelitian Bisnis  
untuk Akuntansi dan  
Manajemen (Cetakan Kedua)*.  
BPFE. Yogyakarta.